

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

DKI Diminta Susun Skema Sekolah Gratis

Setengah lulusan SD-SMA sederajat di DKI Jakarta berasal dari keluarga kurang mampu dan belajar di sekolah swasta. Biaya menjadi masalah.

JAKARTA, KOMPAS — Kegaduhan penerimaan peserta didik baru membuat DPRD DKI Jakarta bertindak. DPRD meminta Dinas Pendidikan menyiapkan skema sekolah gratis. Untuk itu, juga perlu disusun skema pemerataan mutu sekolah negeri dan swasta berikut keringanan biaya agar wajib belajar 12 tahun terwujud.

"Jangan sampai ada anak putus sekolah karena alasan apa pun. Apalagi jika alasannya tidak mendapatkan sekolah yang dekat dari rumah dan terjangkau biayanya," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam rapat evaluasi PPDB 2020 di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Pada PPDB 2020/2021 terdapat beberapa jalur, yakni zonasi, inklusi, zonasi bina RW (rukun warga) di sekitar sekolah, afirmasi, prestasi akademik, prestasi nonakademik, luar Jakarta, dan pindah tugas orangtua. Tahun ini, total ada 92.726 anak diterima di jenjang SD-SMA dan SMK negeri.

Untuk jenjang SMP hanya 46 persen lulusan SD sederajat yang diterima di SMP negeri. Lalu, 32 persen lulusan SMP sederajat masuk SMA/SMK negeri. Itu karena keterbatasan sekolah negeri di Jakarta.

Sesungguhnya, jika dihitung dengan sekolah swasta, jumlah sekolah di Ibu Kota surplus karena jenjang SMP, SMA, dan SMK jumlah sekolah swasta bisa tiga kali lipat sekolah negeri. Ini belum termasuk madrasah.

Jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi anak-anak pemegang KJP, Kartu Indonesia Pintar, Jaklingko, dan kriteria miskin dari Data Terpadu Kese-

Siswa Pemegang KJP yang Diterima di Sekolah Negeri Tahun 2020



jahteraan Sosial tak bisa menampung semua peserta didik. Hanya 52,78 persen pemegang KJP dari tingkat SD-SMA dan SMK yang diterima di sekolah negeri, sisanya masuk swasta.

Alfia (50), salah satunya. Anak bungusnya gagal masuk SMK negeri. Kegagalan anaknya yang berusia 15 tahun itu memupus harapan. Selulus sekolah mereka berharap anak bisa langsung bekerja.

Tak mampu membayar

Hendak ke SMK swasta, Alfia dan suami tak mampu membayar. Uang masuk Rp 5 juta tak mampu mereka penuh (*Kompas*, 14/7/2020). "Apabila Jawa Tengah dan Manado di Sulawesi Utara bisa menggratiskan pendidikan bagi anak miskin di sekolah swasta, seharusnya Jakarta juga bisa," kata Merry Hotma, anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DKI Jakarta Imam Parikesit yang hadir dalam rapat di DPR menjelaskan, biaya di sekolah swasta dibagi tiga bagian. Pertama, biaya operasional yang bisa dibebaskan dari KJP. Kedua, biaya personal yang bisa dari hibah ataupun Bantuan Operasional Sekolah. Yang ketiga, uang pangkal yang sebenarnya bisa disesuaikan agar bisa dicicil satu semester.

"Pencicilan ini bisa didiskusikan Dinas Pendidikan dengan BMPS karena tidak semua sekolah swasta pada level mutu maupun kemampuan ekonomi yang sama sehingga pendekatannya jangan homogen. Tapi, ini lebih baik jika dibandingkan dengan Dinas Pendidikan menambah kuota siswa per rombongan belajar dari 36 menjadi 40 karena melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebu-

dayaan No 22/2016," paparnya.

Imam bersama para anggota Komisi E mendesak Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan perda pendidikan. Di dalam naskah terakhir diterangkan, ada kewajiban sekolah swasta ataupun negeri melaksanakan subsidi silang antara siswa mapan dan ekonomi rentan. Itu memungkinkan semua anak bisa mengenyam pendidikan, pada saat yang sama sekolah tetap punya dana operasional.

Perda itu juga harus merinci aturan zonasi. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana menjabarkan, seleksi memakai usia anak dipilih karena zonasi menggunakan radius atau jarak di Jakarta susah diterapkan.

Saat rapat simulasi zonasi menggunakan poligon RW, ada RW-RW masuk titik buta. Jauh dari sekolah mana pun.

Saat simulasi berbasis radius, sekolah di wilayah permukiman padat langsung terisi penuh dalam beberapa ratus meter. Metode jarak juga sulit karena berbagai citra satelit dan pengukuran jarak digital penghitungannya bervariasi.

"Usia sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Karena itu, kami memutuskan usia jadi kriteria seleksi PPDB," tutur Nahdiana.

Pada PPDB 2020, rata-rata usia masuk SD 6-8 tahun meski ada juga 9-11 tahun. Jenjang SMP, rata-rata 11-13 tahun, sebagian 10, 14, dan 15 tahun.

Di level SMA, mayoritas siswa baru usia 15 tahun diikuti 16, 14, dan 17 tahun. Ada kasus SMA menerima usia 18 dan 19 tahun. Di SMK mayoritas usia 15 tahun, 16, dan 17 tahun. Ada pula siswa 14 tahun, 18, 19, dan 20 tahun meski sedikit. (DNE)